



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA,SH
2. Jabatan : KETUA
3. NHK : 631917

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 6.440.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1840 m2/300 m2 di KAB / KOTA GIANYAR, WARISAN Rp. 6.440.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 32.500.000

1. MOTOR, HONDA SPACY Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA F1C02N46LO A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 28.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 8.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 1.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. 54.500.000

**Sub Total** Rp. 6.536.000.000

**III. HUTANG** Rp. ----

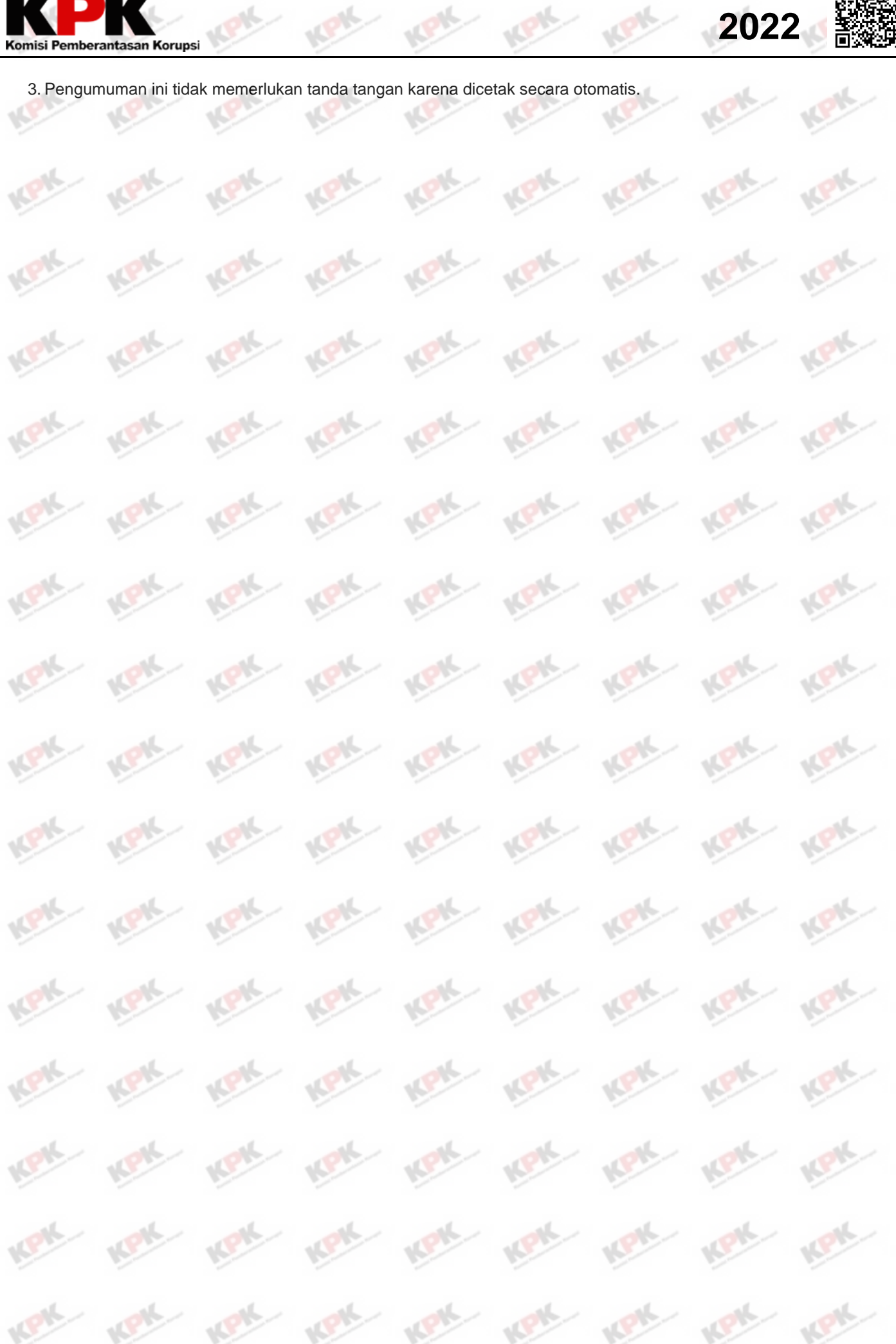
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 6.536.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF

**LEMBAGA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

**UNIT KERJA** : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : GEDE SUTRAWAN

2. Jabatan : ANGGOTA

3. NHK : 629219

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 385.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m<sup>2</sup>/36 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m<sup>2</sup>/1100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp. 110.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 250.000

1. LAINNYA, SEIKO AUTOMATIK Tahun 1980, WARISAN Rp. 250.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. ---

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 8.000.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 393.250.000

**III. HUTANG** Rp. 175.000.000

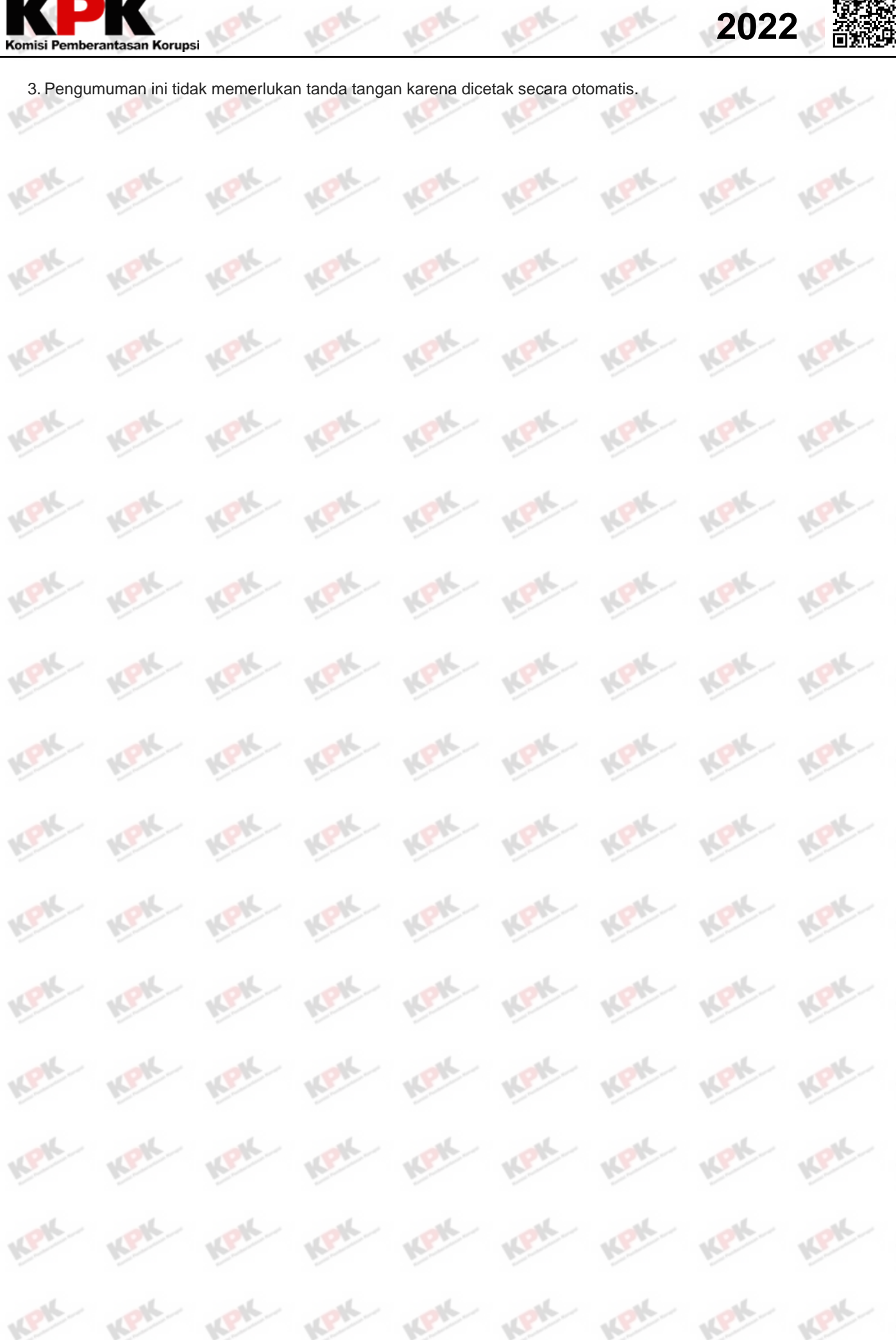
**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 218.250.000

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.





**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 656174

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 8.815.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 950 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 8.050.000.000
2. Tanah Seluas 1500 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 765.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 147.800.000

1. MOBIL, SUZUKI TM2FX (4X2) A/T / MINIBUS-001 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.300.000
3. MOTOR, HONDA NC11D1D A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.200.000
4. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.300.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.850.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 12.522.255

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 8.981.172.255

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 8.981.172.255

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : I WAYAN WIRKA
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 670749

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA TABANAN, LAINNYA Rp. 500.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	14.000.000
1. MOTOR, HONDA CB 150 R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	117.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	631.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	143.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	488.000.000

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : KETUT ARIYANI  
2. Jabatan : KETUA  
3. NHK : 691664

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	200.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 235 m <sup>2</sup> /150 m <sup>2</sup> di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000		
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	----
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	----
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	20.000.000
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	48.000.000
<b>Sub Total</b>	Rp.	268.000.000
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	348.000.000
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	-80.000.000

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.